



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.01.2.692031/2025**



DS:2015-0441-0806-2041

Revisi ke 02

Tanggal : 21 Februari 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 3. Provinsi : (29) BANTEN
 4. Kode>Nama Satker : (692031) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
- Sebesar : Rp. 23.932.963.000 (DUA PULUH TIGA MILIAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.01.WA Program Dukungan Manajemen
135.01.WA. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum

	Jumlah Uang
Rp.	23.932.963.000
Rp.	23.932.963.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	23.932.963.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN S E R A N G (020) Rp. 23.932.963.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692031/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2015-0441-0806-2041

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (692031) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : I A. 1

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen			23.932.963.000
Kegiatan	:	7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum			23.932.963.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	13.781.839.000
Rincian Output	:	01 EBA.001	Pengelolaan BMN Kantor Wilayah	2.00	Laporan	138.613.000
		02 EBA.002	Layanan Kerja Sama	1.00	Laporan	16.860.000
		03 EBA.956	Layanan BMN	1.00	Layanan	9.670.000
		04 EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	395.610.000
		05 EBA.959	Layanan Protokoler	1.00	Layanan	106.410.000
		06 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	129.400.000
		07 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	12.985.276.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	255,00	Unit, m2, Paket	9.006.929.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	245.00	Unit	3.722.113.000
		02 EBB.971	Layanan Prasarana Internal	10.00	Unit	5.284.816.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	69,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	412.400.000
Rincian Output	:	01 EBC.001	Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM	1.00	Layanan	222.000.000
		02 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	68.00	Orang	190.400.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	16,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	731.795.000
Rincian Output	:	01 EBD.001	Pengelolaan Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	2.00	Laporan	151.598.000
		02 EBD.002	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	3.00	Dokumen	46.500.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692031/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2015-0441-0806-2041

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (692031) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : I A. 2

Layanan Manajemen Kinerja Internal			Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		
03	EBD.003	Koordinasi dan konsultasi Manajemen Keuangan	2.00	Laporan	127.190.000
04	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.00	Laporan	215.887.000
05	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2.00	Dokumen	19.000.000
06	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	3.00	Laporan	159.570.000
07	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Laporan	12.050.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 135.01.2.692031/2025

I B. SUMBER DANA



DS:2015-0441-0806-2041

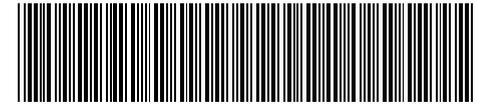
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 Provinsi : (29) BANTEN
 Kode>Nama Satker : (692031) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	23.932.963.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	23.932.963.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692031/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



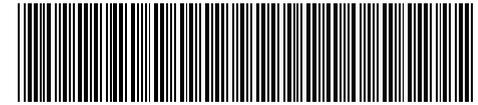
DS:2015-0441-0806-2041

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (692031) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692031	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN	8.323.322	6.621.462	8.988.179	-	-	23.932.963		
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	8.323.322	6.621.462	8.988.179	-	-	23.932.963		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	8.323.322	6.621.462	8.988.179	-	-	23.932.963		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (29.53 BANTEN / KOTA SERANG)	8.323.322	5.458.517	-	-	-	13.781.839	29 . 53	
01	RM	8.323.322	5.458.517	-	-	-	13.781.839	020@	
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (29.53 BANTEN / KOTA SERANG)	-	18.750	8.988.179	-	-	9.006.929	29 . 53	
01	RM	-	18.750	8.988.179	-	-	9.006.929	020@	
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (29.53 BANTEN / KOTA SERANG)	-	412.400	-	-	-	412.400	29 . 53	
01	RM	-	412.400	-	-	-	412.400	020@	
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (29.53 BANTEN / KOTA SERANG)	-	731.795	-	-	-	731.795	29 . 53	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692031/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2015-0441-0806-2041

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (692031) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	731.795	-	-	-	731.795	020@	
JUMLAH		8.323.322	6.621.462	8.988.179	-	-	23.932.963		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692031/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2015-0441-0806-2041

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (692031) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692031	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	673.526	1.115.326	5.214.500	1.125.939	2.562.706	3.075.841	3.167.323	1.109.053	1.128.689	1.208.838	1.126.799	2.424.423	23.932.963
		BELANJA PEGAWAI	640.475	715.326	715.326	615.661	615.661	1.125.796	598.685	598.685	615.661	615.661	615.661	850.724	8.323.322
		BELANJA BARANG	33.051	400.000	400.000	510.278	510.028	513.028	553.667	510.368	513.028	593.177	511.138	1.573.699	6.621.462
		BELANJA MODAL	0	0	4.099.174	0	1.437.017	1.437.017	2.014.971	0	0	0	0	0	8.988.179
	135.01.WA.7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	673.526	1.115.326	5.214.500	1.125.939	2.562.706	3.075.841	3.167.323	1.109.053	1.128.689	1.208.838	1.126.799	2.424.423	23.932.963
		51 BELANJA PEGAWAI	640.475	715.326	715.326	615.661	615.661	1.125.796	598.685	598.685	615.661	615.661	615.661	850.724	8.323.322
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	33.051	400.000	400.000	510.278	510.028	513.028	553.667	510.368	513.028	593.177	511.138	1.573.699	6.621.462
		53 BELANJA MODAL	0	0	4.099.174	0	1.437.017	1.437.017	2.014.971	0	0	0	0	0	8.988.179

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692031/2025
IV A. B L O K I R**



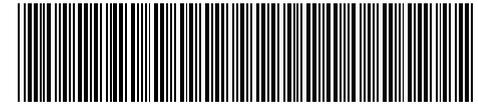
DS:2015-0441-0806-2041

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [692031] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692031	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 10.535.585		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 120.000
	52 Belanja Barang Rp. 1.594.183		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
	53 Belanja Modal Rp. 8.941.402		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 256.094
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
	521211 Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 147.680	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)	7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 141.805		521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel(RM)
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.750
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.000	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		Catatan Pick Up : 1 Unit, Kendaraan Bermotor roda 3 : 1 unit
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.656.586
	522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya(RM)		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.000		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan Renovasi Pagar Depan Gedung Kantor Kanwil 122M2, Renovasi Rumah Dinas Kanwil 350M2, Penambahan Penutup Atap Parkiran Motor 202M2
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.284.816
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.200		efisiensi anggaran TA.2025
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		521211 Belanja Bahan(RM)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692031/2025
IV A. B L O K I R**



DS:2015-0441-0806-2041

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [692031] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan efisiensi anggaran TA.2025 Rp. 239.755 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Rp. 222.930 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(RM)	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan efisiensi anggaran TA. 2025 Rp. 54.000 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan efisiensi anggaran TA.2025 Rp. 9.435 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan efisiensi anggaran TA.2025 Rp. 47.200 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Rp. 30.744 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Rp. 1.020 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
521211	Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan efisiensi anggaran TA.2025 Rp. 230.545 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan efisiensi anggaran TA.2025 Rp. 30.000 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692031/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:2015-0441-0806-2041

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [692031] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692031	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN		
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
		Rp.	5.563.808
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* Pick Up : 1 Unit, Kendaraan Bermotor roda 3 : 1 unit	Rp.	278.992
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		
	* Renovasi Pagar Depan Gedung Kantor Kanwil 122M2, Renovasi Rumah Dinas Kanwil 350M2, Penambahan Penutup Atap Parkiran Motor 202M2	Rp.	5.284.816

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.03.2.693051/2025**



DS:8305-2003-1530-7092

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01

Tanggal : 21 Februari 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. Provinsi : (29) BANTEN
4. Kode>Nama Satker : (693051) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
- Sebesar : Rp. 648.635.000 (ENAM RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.03.BB Program Pembentukan Regulasi
135.03.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 648.635.000
Rp. 648.635.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	648.635.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN S E R A N G (020) Rp. 648.635.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693051/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8305-2003-1530-7092

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (693051) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : I A. 1

Program	:	135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi			648.635.000
Kegiatan	:	7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			648.635.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan			
		2. 01	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	37,00	Rekomendasi Kebijakan	527.805.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	37,00	Rekomendasi Kebijakan	527.805.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7129.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	12,00	Orang	62.704.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	12,00	Orang	62.704.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	58.126.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	1,00	Laporan	58.126.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 135.03.2.693051/2025

I B. SUMBER DANA



DS:8305-2003-1530-7092

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 Provinsi : (29) BANTEN
 Kode>Nama Satker : (693051) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	648.635.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	648.635.000		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693051/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8305-2003-1530-7092

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (693051) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693051	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN	-	648.635	-	-	-	648.635		
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	648.635	-	-	-	648.635		
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	648.635	-	-	-	648.635		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (29.00 BANTEN / BANTEN)	-	527.805	-	-	-	527.805	29 . 00	
01	RM	-	527.805	-	-	-	527.805	020@	
7129.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (29.51 BANTEN / KOTA TANGERANG)	-	62.704	-	-	-	62.704	29 . 51	
01	RM	-	62.704	-	-	-	62.704	020@	
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (29.51 BANTEN / KOTA TANGERANG)	-	58.126	-	-	-	58.126	29 . 51	
01	RM	-	58.126	-	-	-	58.126	020@	
JUMLAH		-	648.635	-	-	-	648.635		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693051/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8305-2003-1530-7092

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (693051) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

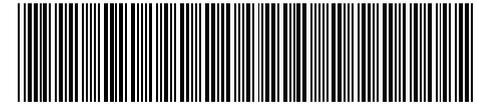
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693051	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	30.000	78.950	54.500	112.620	82.410	46.000	55.290	65.325	0	123.540	648.635
		BELANJA BARANG	0	0	30.000	78.950	54.500	112.620	82.410	46.000	55.290	65.325	0	123.540	648.635
	135.03.BB.7129	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	0	0	30.000	78.950	54.500	112.620	82.410	46.000	55.290	65.325	0	123.540	648.635
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	30.000	78.950	54.500	112.620	82.410	46.000	55.290	65.325	0	123.540	648.635

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693051/2025
IV A. B L O K I R**



DS:8305-2003-1530-7092

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [693051] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693051	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 486.908		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 486.908	7129.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	521211	Belanja Bahan(RM)
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.484
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		efisiensi anggaran
	521211 Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 90.385	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
	efisiensi anggaran		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		efisiensi anggaran
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.000	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	efisiensi anggaran		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.200
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 257.373	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	efisiensi anggaran		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.920
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		efisiensi anggaran
	524112 Belanja Perjalanan Dinas Tetap(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.550	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	efisiensi anggaran		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.800
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		efisiensi anggaran
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.820	521211	Belanja Bahan(RM)
	efisiensi anggaran		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.026
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		efisiensi anggaran
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.800	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693051/2025
IV A. B L O K I R**



DS:8305-2003-1530-7092

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [693051] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	<p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.550 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p>		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693051/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:8305-2003-1530-7092

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [693051] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

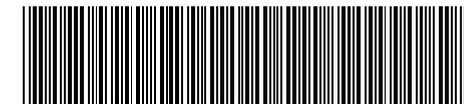
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttt.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692071/2025**



DS:2385-4842-6057-9890

Revisi ke 01

Tanggal : 21 Februari 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 3. Provinsi : (29) BANTEN
 4. Kode>Nama Satker : (692071) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
- Sebesar : Rp. 2.260.316.000 (DUA MILIAR DUA RATUS ENAM PULUH JUTA TIGA RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
135.04.BF.7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 2.260.316.000
Rp. 2.260.316.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	2.260.316.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN S E R A N G (020) Rp. 2.260.316.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692071/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2385-4842-6057-9890

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (692071) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : I A. 1

Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				2.260.316.000
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah				2.260.316.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan				
		2. 01	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah				
		3. 01	Persentase Permohonan Layanan BHP yang diselesaikan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	5,00	layanan		1.001.933.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4,00	layanan		995.933.000
		02 BAH.003	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah	1,00	layanan		6.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara		5.180.000
Rincian Output	:	01 BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	1,00	Perkara		5.180.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	8,00	Lembaga		1.253.203.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	8,00	Lembaga		1.253.203.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 135.04.2.692071/2025

I B. SUMBER DANA



DS:2385-4842-6057-9890

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Provinsi : (29) BANTEN
 Kode>Nama Satker : (692071) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : I B. 1

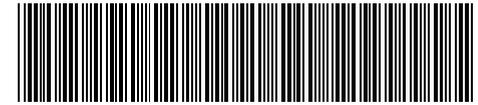
					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	2.260.316.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	2.260.316.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692071/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2385-4842-6057-9890

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (692071) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692071	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN	-	2.260.316	-	-	-	2.260.316		
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.260.316	-	-	-	2.260.316		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	2.260.316	-	-	-	2.260.316		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (29.51 BANTEN / KOTA TANGERANG)	-	1.001.933	-	-	-	1.001.933	29 . 51	
04	PNBP	-	1.001.933	-	-	-	1.001.933	020@	
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga (29.51 BANTEN / KOTA TANGERANG)	-	5.180	-	-	-	5.180	29 . 51	
04	PNBP	-	5.180	-	-	-	5.180	020@	
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (29.51 BANTEN / KOTA TANGERANG)	-	1.253.203	-	-	-	1.253.203	29 . 51	
04	PNBP	-	1.253.203	-	-	-	1.253.203	020@	
JUMLAH		-	2.260.316	-	-	-	2.260.316		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692071/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2385-4842-6057-9890

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (692071) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692071	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	218.096	202.234	218.746	255.598	258.085	238.901	240.207	282.534	162.412	177.910	5.593	2.260.316
		BELANJA BARANG	0	218.096	202.234	218.746	255.598	258.085	238.901	240.207	282.534	162.412	177.910	5.593	2.260.316
	135.04.BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	218.096	202.234	218.746	255.598	258.085	238.901	240.207	282.534	162.412	177.910	5.593	2.260.316
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	218.096	202.234	218.746	255.598	258.085	238.901	240.207	282.534	162.412	177.910	5.593	2.260.316

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692071/2025
IV A. B L O K I R**



DS:2385-4842-6057-9890

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [692071] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692071	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 1.383.816		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 1.383.816	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.100
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 98.900		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 235.737
	efisiensi anggaran		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)		521211 Belanja Bahan(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.300		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.000
	efisiensi anggaran		efisiensi anggaran
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.090
	efisiensi anggaran		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		521211 Belanja Bahan(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.300		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 96.868
	efisiensi anggaran		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 44.886		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 426.700
	3.000.000		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		522141 Belanja Sewa(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 70.800		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692071/2025
IV A. B L O K I R**



DS:2385-4842-6057-9890

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [692071] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 72.000		
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)			
	Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 6.100		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)			
	Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 109.200		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)			
	Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 112.340		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)			
	Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 53.495		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692071/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:2385-4842-6057-9890

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [692071] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.693017/2025**



DS:6703-7431-3905-2012

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01

Tanggal : 21 Februari 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
 3. Provinsi : (29) BANTEN
 4. Kode/Nama Satker : (693017) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
- Sebesar : Rp. 2.607.370.000 (DUA MILIAR ENAM RATUS TUJUH JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
135.05.BF.7121 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 2.607.370.000
Rp. 2.607.370.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 2.607.370.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN S E R A N G (020) Rp. 2.607.370.000

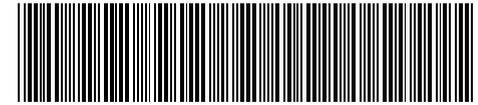
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693017/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6703-7431-3905-2012

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (693017) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : I A. 1

Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.607.370.000
Kegiatan	:	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			2.607.370.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah			
		2. 01	Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah			
		3. 02	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7121.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4.050,00	Orang	2.538.486.000
Rincian Output	:	01 BDC.001	Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	2700.00	Orang	2.196.166.000
		02 BDC.002	Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1200.00	Orang	285.050.000
		03 BDC.003	Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	150.00	Orang	57.270.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7121.BKB	Pemantauan produk	3,00	Produk, Layanan	68.884.000
Rincian Output	:	01 BKB.001	Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	3.00	Layanan	68.884.000

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

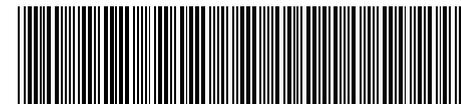
ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 135.05.2.693017/2025

I B. SUMBER DANA



DS:6703-7431-3905-2012

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
 Provinsi : (29) BANTEN
 Kode>Nama Satker : (693017) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : I B. 1

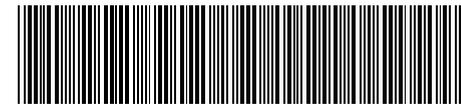
					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	2.607.370.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	2.607.370.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693017/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6703-7431-3905-2012

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (693017) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693017	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN	-	2.607.370	-	-	-	2.607.370		
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.607.370	-	-	-	2.607.370		
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	2.607.370	-	-	-	2.607.370		
7121.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (29.51 BANTEN / KOTA TANGERANG)	-	2.538.486	-	-	-	2.538.486	29 . 51	
04	PNBP	-	2.538.486	-	-	-	2.538.486	020@	
7121.BKB	Pemantauan produk (29.51 BANTEN / KOTA TANGERANG)	-	68.884	-	-	-	68.884	29 . 51	
04	PNBP	-	68.884	-	-	-	68.884	020@	
JUMLAH		-	2.607.370	-	-	-	2.607.370		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693017/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6703-7431-3905-2012

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (693017) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

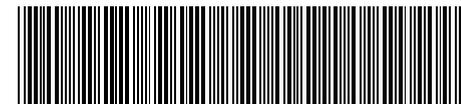
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693017	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	18.324	346.666	382.093	406.895	424.168	216.397	268.128	380.761	43.345	46.386	37.226	36.978	2.607.370
		BELANJA BARANG	18.324	346.666	382.093	406.895	424.168	216.397	268.128	380.761	43.345	46.386	37.226	36.978	2.607.370
	135.05.BF.7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	18.324	346.666	382.093	406.895	424.168	216.397	268.128	380.761	43.345	46.386	37.226	36.978	2.607.370
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	18.324	346.666	382.093	406.895	424.168	216.397	268.128	380.761	43.345	46.386	37.226	36.978	2.607.370

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693017/2025
IV A. B L O K I R**



DS:6703-7431-3905-2012

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [693017] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693017	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN		efisiensi anggaran
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 2.107.370		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 2.107.370	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.140.000
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7121.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	7121.BKB	Pemantauan produk
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		521211 Belanja Bahan(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 510.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.939
	efisiensi anggaran		efisiensi anggaran
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522141 Belanja Sewa(PNBP)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 150.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 31.435
	efisiensi anggaran		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.200		
	efisiensi anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 67.376		
	efisiensi anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 175.170		
	efisiensi anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.250		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693017/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:6703-7431-3905-2012

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [693017] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

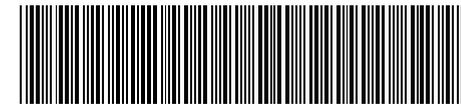
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693119/2025**



DS:7214-3535-0605-5341

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01

Tanggal : 21 Februari 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 2. Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 3. Provinsi : (29) BANTEN
 4. Kode>Nama Satker : (693119) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
- Sebesar : Rp. 2.525.272.000 (DUA MILIAR LIMA RATUS DUA PULUH LIMA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	2.525.272.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN S E R A N G (020) Rp. 2.525.272.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693119/2025



DS:7214-3535-0605-5341

Satker : (693119) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	138.004.000
BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp.	138.004.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	2.387.268.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	2.387.268.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693119/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7214-3535-0605-5341

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (693119) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : I A. 1

Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi			138.004.000
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah			138.004.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan			
		2. 02	Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	61.927.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	61.927.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga	76.077.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	76.077.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.387.268.000
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			2.387.268.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah			
		2. 01	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi			
		3. 01	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah			
		4. 02	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	10,00	Lembaga	82.281.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	10,00	Lembaga	82.281.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7,00	Kelompok Masyarakat	131.492.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah	2,00	Kelompok Masyarakat	71.910.000
		02 BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	5,00	Kelompok Masyarakat	59.582.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693119/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7214-3535-0605-5341

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (693119) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : I A. 2

Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

Kelompok Masyarakat

Klasifikasi Rincian Output	3	:	7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	1,00	Orang	60.755.000
Rincian Output		:	01 BIB.001	Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah	1,00	Orang	60.755.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	21,00	Lembaga	92.020.000
Rincian Output		:	01 BIC.001	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	21,00	Lembaga	92.020.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	dokumen, Peta, Data	62.190.000
Rincian Output		:	01 BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah	1,00	dokumen	62.190.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	54.450.000
Rincian Output		:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	1,00	Laporan	54.450.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	206,00	Orang	1.648.000.000
Rincian Output		:	01 QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	206,00	Orang	1.648.000.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	24,00	Kelompok Masyarakat	256.080.000
Rincian Output		:	01 QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	24,00	Kelompok Masyarakat	256.080.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

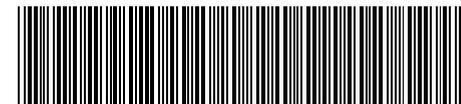
ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 135.11.2.693119/2025

I B. SUMBER DANA



DS:7214-3535-0605-5341

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Provinsi : (29) BANTEN
 Kode>Nama Satker : (693119) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : I B. 1

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	2.525.272.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	2.525.272.000		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693119/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



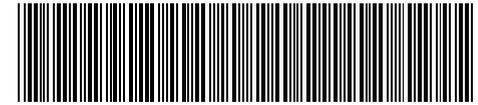
DS:7214-3535-0605-5341

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (693119) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693119	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN	-	2.523.288	1.984	-	-	2.525.272		
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	138.004	-	-	-	138.004		
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	-	138.004	-	-	-	138.004		
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (29.00 BANTEN / BANTEN)	-	61.927	-	-	-	61.927	29.00	
01	RM	-	61.927	-	-	-	61.927	020@	
7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (29.00 BANTEN / BANTEN)	-	76.077	-	-	-	76.077	29.00	
01	RM	-	76.077	-	-	-	76.077	020@	
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.385.284	1.984	-	-	2.387.268		
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	2.385.284	1.984	-	-	2.387.268		
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (29.00 BANTEN / BANTEN)	-	80.297	1.984	-	-	82.281	29.00	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693119/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7214-3535-0605-5341

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (693119) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	80.297	1.984	-	-	82.281	020@	
7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (29.00 BANTEN / BANTEN)	-	131.492	-	-	-	131.492	29 . 00	
01 RM		-	131.492	-	-	-	131.492	020@	
7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (29.00 BANTEN / BANTEN)	-	60.755	-	-	-	60.755	29 . 00	
01 RM		-	60.755	-	-	-	60.755	020@	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (29.00 BANTEN / BANTEN)	-	92.020	-	-	-	92.020	29 . 00	
01 RM		-	92.020	-	-	-	92.020	020@	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik (29.00 BANTEN / BANTEN)	-	62.190	-	-	-	62.190	29 . 00	
01 RM		-	62.190	-	-	-	62.190	020@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693119/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7214-3535-0605-5341

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (693119) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (29.00 BANTEN / BANTEN)	-	54.450	-	-	-	54.450	29 . 00	
01	RM	-	54.450	-	-	-	54.450	020@	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (29.00 BANTEN / BANTEN)	-	1.648.000	-	-	-	1.648.000	29 . 00	
01	RM	-	1.648.000	-	-	-	1.648.000	020@	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (29.00 BANTEN / BANTEN)	-	256.080	-	-	-	256.080	29 . 00	
01	RM	-	256.080	-	-	-	256.080	020@	
JUMLAH		-	2.523.288	1.984	-	-	2.525.272		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693119/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7214-3535-0605-5341

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (693119) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

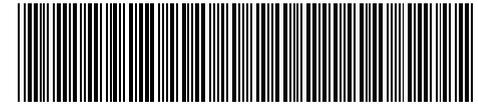
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693119	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.984	245.450	284.392	227.200	247.788	276.128	253.198	235.833	264.628	256.938	231.733	0	2.525.272
		BELANJA BARANG	1.692	245.450	284.392	227.200	247.788	275.282	253.198	235.833	263.782	256.938	231.733	0	2.523.288
		BELANJA MODAL	292	0	0	0	0	846	0	0	846	0	0	0	1.984
	135.11.BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	0	22.967	23.770	18.157	5.540	31.960	1.480	12.700	14.770	6.660	0	0	138.004
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	22.967	23.770	18.157	5.540	31.960	1.480	12.700	14.770	6.660	0	0	138.004
	135.11.BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	1.984	222.483	260.622	209.043	242.248	244.168	251.718	223.133	249.858	250.278	231.733	0	2.387.268
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	1.692	222.483	260.622	209.043	242.248	243.322	251.718	223.133	249.012	250.278	231.733	0	2.385.284
		53 BELANJA MODAL	292	0	0	0	0	846	0	0	846	0	0	0	1.984

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693119/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7214-3535-0605-5341

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [693119] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693119	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.180
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 1.902.942		Efisiensi Anggaran
	52 Belanja Barang Rp. 1.902.942		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Efisiensi Anggaran
	521211 Belanja Bahan(RM)	135.11.BF	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.987	7136	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
	Efisiensi Anggaran	7136.BDB	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		521211 Belanja Bahan(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.107
	Efisiensi Anggaran		Efisiensi Anggaran
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.180		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.000
	Efisiensi Anggaran		Efisiensi Anggaran
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.760		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.400
	Efisiensi Anggaran		Efisiensi Anggaran
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	521211 Belanja Bahan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.780
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.697		Efisiensi Anggaran
	Efisiensi Anggaran		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.010
	Tidak Dapat Dicairkan		Efisiensi Anggaran

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693119/2025
IV A. B L O K I R**



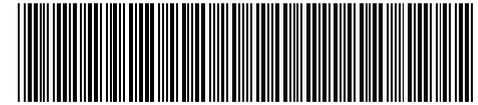
DS:7214-3535-0605-5341

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [693119] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7136.BDD	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	7136.BIC	Efisiensi Anggaran
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.532		521211 Belanja Bahan(RM)
	Efisiensi Anggaran		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Anggaran
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.800		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Efisiensi Anggaran		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 44.220
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Anggaran
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.560	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
Efisiensi Anggaran	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.800		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Efisiensi Anggaran		
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	7136.BMA Data dan Informasi Publik		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.600	521211 Belanja Bahan(RM)		
Efisiensi Anggaran	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.740		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Efisiensi Anggaran		
7136.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
521211 Belanja Bahan(RM)	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.595	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.200		
Efisiensi Anggaran	Efisiensi Anggaran		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 160	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.250		
Efisiensi Anggaran	Efisiensi Anggaran		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)			
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.000			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693119/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7214-3535-0605-5341

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [693119] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran Rp. 9.990 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran Rp. 17.460 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran Rp. 12.000 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran Rp. 1.218.173 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran Rp. 190.561 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693119/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:7214-3535-0605-5341

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [693119] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

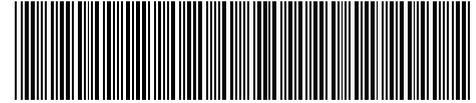
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.12.2.693153/2025**



DS:4594-8236-7225-4165

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01

Tanggal : 21 Februari 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
3. Provinsi : (29) BANTEN
4. Kode>Nama Satker : (693153) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
- Sebesar : Rp. 305.566.000 (TIGA RATUS LIMA JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.12.WA Program Dukungan Manajemen
135.12.WA. Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 305.566.000
Rp. 305.566.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	305.566.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN S E R A N G (020) Rp. 305.566.000

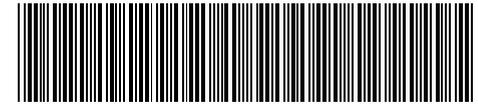
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693153/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4594-8236-7225-4165

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (693153) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

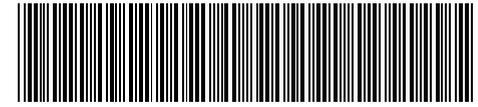
Halaman : I A. 1

Program	:	135.12.WA	Program Dukungan Manajemen			305.566.000
Kegiatan	:	7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah			305.566.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	4,00	Rekomendasi Kebijakan	285.620.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	4.00	Rekomendasi Kebijakan	285.620.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	50,00	orang	19.946.000
Rincian Output	:	01 AEF.001	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum	50.00	orang	19.946.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693153/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4594-8236-7225-4165

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (693153) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
Kewenangan : (KD)

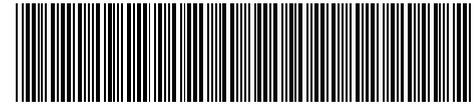
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693153	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN	-	305.566	-	-	-	305.566		
135.12.WA	Program Dukungan Manajemen	-	305.566	-	-	-	305.566		
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	-	305.566	-	-	-	305.566		
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (29.53 BANTEN / KOTA SERANG)	-	285.620	-	-	-	285.620	29 . 53	
01	RM	-	285.620	-	-	-	285.620	020@	
7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (29.51 BANTEN / KOTA TANGERANG)	-	19.946	-	-	-	19.946	29 . 51	
01	RM	-	19.946	-	-	-	19.946	020@	
JUMLAH		-	305.566	-	-	-	305.566		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693153/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4594-8236-7225-4165

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (693153) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693153	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	20.630	36.498	37.426	13.890	25.766	44.080	35.294	21.590	37.645	24.507	8.240	0	305.566
		BELANJA BARANG	20.630	36.498	37.426	13.890	25.766	44.080	35.294	21.590	37.645	24.507	8.240	0	305.566
	135.12.WA.7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	20.630	36.498	37.426	13.890	25.766	44.080	35.294	21.590	37.645	24.507	8.240	0	305.566
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	20.630	36.498	37.426	13.890	25.766	44.080	35.294	21.590	37.645	24.507	8.240	0	305.566

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693153/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4594-8236-7225-4165

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [693153] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

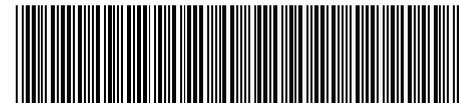
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693153	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.500 efisiensi anggaran
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 205.566		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 205.566	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
135.12.WA 7143	Program Dukungan Manajemen		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.750 efisiensi anggaran
	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	521211 Belanja Bahan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.870 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 32.031 efisiensi anggaran		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.700 efisiensi anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 95.839 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.050 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.826 efisiensi anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693153/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:4594-8236-7225-4165

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [693153] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001